

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA JAMAAH UMRAH TERHADAP HOMOLOGASI
PERKARA KEPAILITAN FIRST TRAVEL**

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Oleh:

ARVID SYAHBUDDIN JANUAR

201510110311173



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA JAMAAH UMRAH TERHADAP HOMOLOGASI
PERKARA KEPAILITAN FIRST TRAVEL**

Dosen Pembimbing 1 : Prof.,Dr.Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum

Dosen Pembimbing 2 : Komariah, S.H., M.Si., M.Hum

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh:
ARVID SYAHBUDDIN JANUAR
201510110311173

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ARVID SYAHBUDDIN JANUAR

201510110311173

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 24 Juli 2019

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

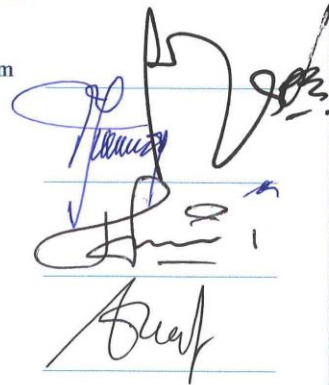
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn



**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA JAMA'AH UMROH TERHADAP HOMOLOGASI
PERKARA KEPAILITAN FIRST TRAVEL**

Diajukan Oleh:

ARVID SYAHBUDDIN JANUAR

201510110311173

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 24 Juli 2019

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Komariah, SH., M.Si., M.Hum



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARVID SYAHBUDDIN JANUAR

NIM : 201510110311173

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA JAMA'AH UMROH TERHADAP HOMOLOGASI
PERKARA KEPAILITAN FIRST TRAVEL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



tanggal, 06 Agustus 2019

Arvid Syahbuddin Januar

MOTTO

Seberapa sulit masalahmu percayalah bahwa selalu ada jalan keluar bagi yang berusaha, karena Allah SWT Tuhan yang maha Adil telah menciptakan segala sesuatunya seimbang dan penuh makna, tidak ada pagi tanpa malam, tidak ada kenyang tanpa lapar, tidak ada sehat tanpa sakit, dan tidak ada pelangi tanpa hujan. Percayalah bahwa setiap kesulitan ada kemudahan dan di setiap tetesan air mata maupun keringat yang kita keluarkan akan terbayar dengan kebahagiaan atas keberhasilan kelak nanti



ABSTRAKSI

Nama : Arvid Syahbuddin Januar

NIM : 201510110311173

Judul : Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Jemaah Umrah Terhadap Homologasi Perkara Kepailitan First Travel

**Pembimbing : Prof.,Dr.Rahayu Hartini, S.H.,M.Si.,M.Hum
Komariah,S.H.,M.Si.,M.Hum**

Ibadah Umrah merupakan Umrah yang dilaksanakan diluar musim dari ibadah haji. Berdasarkan Pasal 4 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dalam penyelenggaraan Ibadah Umrah tidak hanya Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah akan tetapi pemerintah juga memiliki kewenangan untuk dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta peran dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Jemaah umrah dari First Travel yang gagal berangkat melaksanakan ibadah umrah dikarenakan First Travel melakukan wanprestasi terhadap kurang lebih \pm 63.000 Jemaah Umrah walaupun sudah adanya status hukum Homologasi antara Jemaah Umrah dan pihak First Travel dengan isi perjanjian perdamaian bahwa First Travel berjanji akan memberangkatkan Jemaah Umrah untuk melaksanakan ibadah umrah dan/atau melakukan refund terhadap Jemaah umrah yang tidak memilih untuk berangkat. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Homologasi antara Debitor (First Travel) dan Kreditor Konkuren (Jemaah Umrah); dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian akan terpenuhinya hak-hak jamaah umrah First Travel dalam Homologasi perkara Kepailitan First Travel. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis normative. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis kasus atau fakta yang menjadi permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan teknik analisa deskriptif kualitatif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini yaitu bahwa meskipun dengan adanya Homologasi antara Jemaah Umrah dan First Travel Jemaah Umrah tetap tidak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah dikarenakan batasan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Akan tetapi pemerintah sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah belum memberikan perlindungan hukum terhadap Jemaah umrah yang tidak bisa berangkat walaupun secara formil dan tekstual penyelenggaraan umrah sudah berjalan cukup baik.

Kata Kunci : Pemerintah, Perlindungan Hukum, Jemaah Umrah, Homologasi, First Travel

ABSTRACT

Name : Arvid Syahbuddin Januar
SID : 201510110311173
Title : The Government's Role in Providing Legal Protection to Umrah Congregations Against Homologation of First Travel Bankruptcy Cases
Advisor : Prof.,Dr.Rahayu Hartini, S.H.,M.Si.,M.Hum Komariah,S.H.,M.Si.,M.Hum

Umrah is an Umrah that is carried out outside the season of the Hajj. Under Article 4 PMA No. 8 of 2018 concerning the Implementation of Umrah Worship Travels In the administration of Umrah services not only is the Umrah Worship Travel Bureau (PPIU) the party that can organize Umrah pilgrimage services but the government also has the authority to be able to carry out Umrah pilgrimages. This thesis study aims to determine the shape and role of the government in providing legal protection against Umrah congregations from First Travel who failed to go to Umrah because First Travel defaulted to approximately ± 63,000 Umrah Congregations despite the legal status of Homologation between Umrah Congregation and parties First Travel with the contents of the peace agreement that First Travel promised to depart the Umrah Congregation to carry out Umrah worship and / or refund the Umrah congregation who did not choose to leave. The formulation of the problem proposed is: What are the legal consequences arising from the Homologation between the Debtor (First Travel) and the Concurrent Creditors (Jamaah Umrah); and What form of legal protection should be carried out by the Government to ensure certainty of the fulfillment of the rights of umrah pilgrims First Travel in the First Travel Bankruptcy Case Homologation. This study included normative Juridical research. In this study using an approach by examining and analyzing cases or facts that become problems with legislation related to qualitative descriptive analysis techniques. The final conclusion of this study is that even though there is a Homologation between Umrah Congregation and First Travel Umrah Congregation, they cannot leave to carry out Umrah worship due to restrictions in Law No. 37 of 2004. However, the government as the party that can hold umrah religious services has not provided legal protection to the Umrah congregation that cannot depart even though formally and textually the administration of Umrah has been going quite well.

Keywords : Government, Legal Protection, Umrah Congregationsl, Homologation, First Travel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada jemaah umrah terhadap homologasi perkara kepailitan firs travel” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Dr.Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Prof., Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum dan Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan motivasi, koreksi yang tak berkesudahan, dan saran yang sangat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

3. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Bapak Januardi dan Ibu Dewi Silviasari selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, memberikan doa terbaik mereka, kasih, cinta, sayang dan uang bulanan serta turut memberikan masukan perihal penulisan penulis;
5. Kepada Adik-Adiku Tersayang Arhanzal, dan Razidan Penulis berterimakasih karena dukungan dari Adik-Adik Penulis yang membuat penulis bisa sampai pada titik ini;
6. Terimakasih kepada Medina Aulia yang telah bersama-sama berjuang dari awal sampai akhir untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini serta Tugas Akhir Skripsi ini, keberadaanmu memberikan arti yang begitu mendalam dalam kehidupan penulis yang selalu memberikan motivasi serta yang selalu menjadi penyemangat penulis.
7. Kepada sahabat Ilham Dwi Rafiqi yang telah menjadi teman berbagi penulis selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini dan selalu memberikan support, doa, dukungan moril, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis mengucapkan terimakasih;
8. Kepada sahabat Febris, Albiyan, Putri sahabat sedari SMA penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat secara langsung maupun tidak langsung penulis mengucapkan banyak terimakasih;

9. Terimakasih kepada Hendry, Arga, Haris teman KKN penulis yang selalu senantiasa memberikan semangat dan motivasi terkait penulisan skripsi ini dan telah memberikan berbagai macam doa, semangat, dukungan dan sikap yang tidak bisa diprediksi oleh penulis;
10. Kepada Marcelino, Rusmala Dewi, Nurfi, Adibatus Sa'diyah, yang telah menjadi teman Seperjuangan penulis selama menyelesaikan skripsi ini penulis dalam berbagi cerita dan memberikan semangat untuk selalu berjuang dan sabar penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga;
11. Terimakasih kepada seluruh pengurus serta keluarga besar PUKASH karena bersama kalian semua selama 4 tahun penulis berproses untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi serta mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Terimakasih kepada FH-C angkatan 2015 yang telah memberikan banyak sekali kenangan, canda tawa, kebaikan, kesedihan, kesengsaraan, pergunjingan, serta hal-hal indah lainnya kepada penulis selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, dan lainnya sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terlaksana dan terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan. Amin.

Malang, 19 Juli 2019

Arvid Syahbuddin Januar



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR PUSTAKA.....	xix
SERTIFIKAT PLAGIASI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	15
BAB I : PENDAHULUAN	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
BAB III : PEMBAHASAN	17
BAB IV : PENUTUP	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Umum Kepailitan dan PKPU	18
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan.....	18
a. Dasar Hukum Kepailitan	20
b. Asas – Asas dalam Hukum Kepailitan.....	22
c. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	23
d. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	26
e. Akibat Hukum Pailit Terhadap Pihak-pihak yang bersangkutan ...	30
2. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 33	
a. Pengertian Dan Pengaturan PKPU.....	33
b. Syarat – Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU	38
c. Pihak – Pihak Yang Berwenang dalam PKPU	44
d. Berakhirnya PKPU	48
e. Akibat Hukum PKPU.....	51
f. Perdamaian dalam PKPU.....	53
3. Tinjauan Umum Tentang Homologasi Dalam PKPU	56
a. Homologasi dalam PKPU	56
b. Syarat – Syarat dan Prosedur Permohonan Homologasi	58
B. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Haji dan Umrah Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008	58
1. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	58
a. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	58
b. Penyelenggara dan Jemaah Ibadah Haji.....	60
c. Asas-Asas Umum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	64
2. Tinjauan Tentang Penyelenggara Ibadah Umrah Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 dan PMA No. 8 Tahun 2018	65

a. Pengertian Ibadah Umrah	65
b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	66
c. Hak - Hak Jemaah Umrah	67
d. Asas-asas dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah	68
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.....	70
a. Peran Menteri Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.....	70
b. Bentuk Pengawasan dan Pengendalian oleh Menteri Agama terhadap PPIU.....	72
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Profil PT. Anugerah Karya Wisata (First Travel) Dalam Melakukan Penyelenggaraan Ibadah Umrah	75
1. Sejarah Singkat Perusahaan PT First Travel	75
2. Visi Misi dan Struktur Organisasi PT First Travel.....	79
3. Program yang Dijalankan First Travel.....	82
B. Akibat Hukum Homologasi Terhadap Debitor First Travel dan Kreditor Jamaah Umrah	91
1. Dampak Homologasi terhadap Debitor (First Travel) dan (Jamaah Umrah)	91
2. Efektifitas Homologasi Terhadap Kreditor Konkuren (Jamaah Umrah)	
97	
C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Seharusnya di lakukan oleh Pemerintah yakni KEMENAG Terhadap Calon Jamaah Umrah.....	102
1. Mekanisme perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	103
2. Mekanisme Pengawasan Kemenag Terhadap Biro PPIU	111

3. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Terselenggaranya Ibadah Umrah Jemaah First Travel.....	117
BAB IV	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	125
LAMPIRAN.....	127



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Singkat PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel)	76
Tabel 1.2 Program Umrah First Travel	84
Tabel 1.3 Ketentuan Persyaratan Administrasi Calon Jamaah Umrah.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	128
Lampiran 2. Berita Acara Seminar Proposal	129
Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	130



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darminto Hartono, 2009, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.
- Huizink, J.B. 2004. *Insolventie*. Jakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahmud M. Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 1997).
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Setara Press, Jakarta, 2002.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, 2001, Bandung
- Richard Burton Simaputang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, 2003

Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke – 11, 2014.

Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Setiono, *Rule of Law (supermasi hukum)*, (Surakarta : Magister hukum program pascasarjan Univ.Sebelas maret, 2004)

Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,

Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat)*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

C. Jurnal

Andi Salman Manggalatung, *Perlindungan Hukum Terhadap Jemaah Umrah Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta Vol. 5 No. 1 2017

- Cholifatun Nisa, Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseoran Terbatas.
- Chynthia Barmore & Chris Miller, *Dumping Debt And Seizing Assets*, Stanford Law Review Jurnal Vol. 67
- Ishak, Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 1 April 2016.
- Marantha Purba, *Homologasi PKPU Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit*, USU Law Journal, Vol. 7 No. 2 Juni 2019.
- Raden Rizki Agung Firmansyah, Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Jurnal Hukum Udayana Law.
- Rizaldi Malkan, *Perlindungan Hukum Calon Jamaah Umrah sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah*
- Savira Rianda Arini dkk, *Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh*, Jural Hukum UNEJ.
- Sihabudin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, Jurnal Hukum Mahasiwa Peradaban, Bandung.
- Windy Fauziah Kusuma, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang Dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-asas dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung.
- Zaenul Arifin, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah, Jurnal Hukum Khairal Ummah Vol. 12 No.4 Desember 2017

D. Internet

- First Travel, *Sejarah First Travel*, <http://firsttravel.go.id>, di akses tanggal 16 Juni 2019.

Karta Raharja Ucu, *35 Ribu Orang Mengikuti Manasik Akbar di Stadion Gelora Bung Karno*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/11/03/necb58-35-ribu-orang-ikuti-manasik-akbar-di-gbk>, Di akses tanggal; 2 Juni 2019.

Kemenag, *Sanksi Kepada PPIU Sejak 2015*, <http://kemenag.go.id>, di akses tanggal 2 Juni 2019.

Kompas, *Aset First Travel Hanya 10% dari Hasil Penggelapan Uang Jamaah Umrah*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/18310731/aset-first-travel-yang-disita-hanya-10-persen-dari-hasil-penggelapan-uang>, di akses tanggal 2 Juni 2019.

Kristian Erdianto, “Kepala PPATK: Bos First Travel Lakukan Pencucian Uang”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/16451231/kepala-ppatk-bos-first-travel-lakukan-pencucian-uang>, 28 Agustus 2017, Di akses tanggal 14 Januari 2019.

Martias gelar Iman Radjo Mulano, 1969, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, PD. Sumut, Medan.

Roziqin, *Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus First Travel*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a7c9a102e79/menggugat-tanggung-jawab-pemerintah-dalam-kasus-first-travel-oleh--roziqin/>, di Akses Tanggal 02 Februari 2019.

Sanny Cicilia, Bos First Travel didakwa rugikan puluhan ribu jamaah, <https://nasional.kontan.co.id/news/bos-first-travel-didakwa-rugikan-puluhan-ribu-jamaah-senilai-rp-9053-miliar>, di akses tanggal 2 Juni 2019.

Wikipedia, *Pengertian Ibadah Umrah*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah>, Di akses tanggal 29 Mei 2019.

E. SEMINAR

Denny Fathurahman, Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah, *Seminar Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah*, pada 20 Maret 2018.

Tree Agung Nugroho, Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah, *Seminar Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah*, Pada Kamis, 20 Maret 2018.

Dewi Gustiana, Dalam kesaksiaanya saat diminta kesaksian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Ricardo Simanjuntak, dalam seminar berjudul *Mengevaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dalam Upaya Membangun Kepastian Berbisnis di Indonesia*, Surabaya, 30 Maret 2019.

Dewi Gustikarini, Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, *Seminar Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah*, pada 20 Maret 2018. Ditjen PHU Kemenag RI.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
NIP : 10611050472
Jabatan : Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ARVUD SYAHBUDDIN JANUAR
Nim : 201510110311173

Dengan Judul Skripsi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Kepada Jemaah Umrah Terhadap Homologasi
Perkara Kepailitan First Travel


Benar **BEBAS PLAGIASI**, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5/10
18




Matang
Kaprodi Fakultas Hukum


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum